

BAB III

PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan pemaparan hasil penelitian tentang pembungkai berita terkait pencurian NIK oleh Dharma Pongrekun sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2024, yang dilaporkan oleh portal berita *online* Kompas.com. Temuan yang akan dijelaskan dalam penelitian ini diperoleh melalui kegiatan media monitoring dan analisis berita-berita mengenai pencurian NIK oleh Dharma Pongrekun sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2024.

3.1 Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah berita dari Kompas.com dengan periode waktu tanggal 1 Agustus 2024 – 31 Agustus 2024, mengenai pencurian NIK yang dilakukan oleh Dharma Pongrekun sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2024

3.2 Temuan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memilih total 10 sampel berita dari 33 berita untuk dianalisis. Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini difokuskan pada berita-berita yang memberikan perhatian besar atau pemberitaan intensif tentang tokoh Dharma Pongrekun, dan memilih berita yang memiliki jumlah komentar yang cukup banyak. Adapun data beritanya sebagai berikut.

Tabel 3. 1 Data Sampel Berita

Berita	Judul	Tim Redaksi	Komentar	Edisi
Berita 1	KPU Tak Bisa Langsung Batalkan Kelolosan Dharma- Kun Usai Ramai Temuan Pencatutan NIK	Firda Janati, Fitrian Chusna Farisa	26	17 Agustus 2024 pukul 19:04 WIB
Berita 2	Dharma-Kun Bisa Dijerat Pidana jika Terbukti Bersalah dalam Pencatutan NIK Warga	Shinta Dwi Ayu, Ambaranie Nadia Kemala Movanita	21	30 Agustus 2024 Pukul 08:18
Berita 3	Ahok Curiga "Ada Sesuatu" yang Buat Dharma-Kun Lolos Jadi Paslon Independen Pilkada Jakarta	Vitorio Mantalean, Ihsanuddin	15	17 Agustus 2024 Pukul 13:28 WIB
Berita 4	Disebut Bakal Lawan "Calon Boneka", Ridwan Kamil:	Febryan Kevin Candra	47	19 Agustus 2024 Pukul 07:07 WIB

	Dharma Pongrekun Bukan "Kaleng- kaleng	Kurniawan, Irfan Maullana		
Berita 5	Dua Kali Mangkir, Dharma-Kun Kembali Dipanggil Bawaslu Jakarta soal Pencatutan NIK	Ruby Rachmadina, Jessi Carina	4	25 Agustus 2024 Pukul 12:03 WIB
Berita 6	Polisi Hentikan Penyelidikan Laporan Pencurian NIK Warga untuk Dukung Dharma-Kun	Baharudin Al Farisi, Ambaranie Nadia Kemala Movanita	12	19 Agustus 2024 Pukul 19:17 WIB
Berita 7	Banyak NIK Dicatut untuk Dukung Dharma-Kun, Jubir Anies: Harus Diinvestigasi demi Cegah Hak Warga Tercoreng	Abdul Haris Maulana	3	16 Agustus 2024 Pukul 21:12 WIB
Berita 8	Diduga Catut NIK Warga Jakarta, Dharma-Kun Mengaku Tidak Terlibat Kumpulkan Data	Firda Janati, Irfan Maullana	5	19 Agustus 2024 Pukul 10:11 WIB

Berita 9	Warga Hanya Didatangi Petugas KPU untuk Coklit, Bukan Verifikasi Dukungan ke Dharma-Kun	Shela Ocravia, Ambaranie Nadia Kemala Movanita	5	16 Agustus 2024 Pukul 14:09
Berita 10	Kritik Keras Pencatutan NIK untuk Dukung Dharma Pongrekun, Politikus PDI-P: Tak Sesuai Prinsip Pemilu	Ryan Sara Pratiwi, Ambaranie Nadia Kemala Movanita	1	16 Agustus 2024 Pukul 17:24 WIB

3.3 *Framing* Berita dalam Kompas.com

Pada penelitian ini, teori yang digunakan yaitu *Framing Theory* (Teori Pembingkai) yaitu cara individu maupun kelompok untuk memahami dunia melalui *frame* atau skema. *Framing* terdiri atas dua komponen utama, salah satunya yaitu tingkat makro. Pada tingkat makro, *framing* berkaitan dengan bagaimana penyajian berita yang disampaikan media (Littlejohn and Foss, 2009). Dalam ranah media, *framing theory* merupakan pendekatan yang relevan untuk menganalisis bagaimana berita mengenai pencurian NIK oleh Dharma Pongrekun sebagai calon gubernur independen Jakarta 2024 disajikan kepada masyarakat.

Dalam penelitian ini, analisis model Robert N. Entman digunakan terhadap berita pada Kompas.com mengenai pencurian NIK oleh Dharma Pongrekun sebagai calon gubernur Jakarta 2024. Terdapat 10 sampel berita dari kompas.com yang dianalisis oleh penulis menggunakan analisis *framing* model Robert N. Entman dengan mengkaji empat tahap analisis *framing* yaitu Define Problem (Mendefinisikan Masalah), Diagnose Causes (Mendiagnosis Penyebaban), Make Moral Judgement (Penghakiman Moral), dan Treatment Recommendation (Rekomendasi Penyelesaian) (Pamungkas, 2023).

3.4 Analisis *Framing* model Robert N. Entman pada Portal Berita Online Kompas.com

3.4.1 Analisis *Framing* Terhadap Berita 1



(Sumber : Kompas.com)

Gambar 3. 1 Screenshot Visual Berita 1

Tabel 3. 2 Analisis Berita 1

<i>Define Problem</i> (Mendefinisikan Masalah).	Berita ini mendefinisikan masalah sebagai ketidakmampuan KPU Jakarta untuk langsung membatalkan status kelolosan Dharma Pongrekun sebagai calon gubernur independen terkait dengan pencurian NIK.
<i>Diagnose Causes</i> (Mendiagnosis Penyebaban).	KPU Jakarta sebagai penyelenggara pemilihan umum mempunyai tanggung jawab untuk memverifikasi data pendukung calon tidak bekerja dengan baik dan ketat sehingga menimbulkan terjadinya pencurian NIK. Kemudian masyarakat yang melaporkan pencurian NIK mereka menunjukkan bahwa terdapat kecurangan dalam pengumpulan data untuk mendukung pasangan calon.
<i>Make Moral Judgement</i> (Penghakiman Moral)	Dengan adanya kasus ini memberikan beberapa penilaian moral, di antaranya positif terhadap KPU yang ditampilkan sebagai lembaga yang mengikuti prosedur dan menjunjung transparansi, serta positif terhadap Bawaslu yang digambarkan responsif dengan mendirikan posko pengaduan. Di sisi lain,

	terdapat penilaian negatif terhadap pencurian NIK yang dilakukan oleh Dharma Pongrekun.
<i>Treatment Recommendation</i> (Rekomendasi Penyelesaian)	Dalam berita ini terdapat beberapa rekomendasi penyesalain masalah yaitu: (1). KPU Jakarta sedang menunggu rekomendasi dari Bawaslu untuk menentukan status kelolosan Dharma-Kun. (2). KPU Jakarta berencana menggelar rapat pleno pada 19 Agustus 2024 untuk membahas status kelolosan Dharma-Kun. (3). Bawaslu telah membuat tempat pengaduan bagi masyarakat Jakarta yang merasa dirugikan.

Sumber : (Pamungkas, 2023)

Merujuk pada tabel 3.2 dapat disimpulkan berita 1 sebagai *framing* yang memfokuskan pada beberapa poin.

- 1) KPU Jakarta tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan status kelolosan Dharma tanpa rekomendasi dari Bawaslu. Dalam berita ini Kompas.com menunjukkan bahwa terdapat prosedur yang harus diikuti dalam sistem pemilihan umum terutama untuk calon independen.

- 2) Bawaslu menunjukkan respon yang cepat dengan mendirikan posko pengaduan untuk mengatasi kasus pencurian NIK dan terdapat rencana KPU untuk menggelar rapat pleno. Hal tersebut menunjukkan nilai transparansi dan keterbukaan dalam penanganan masalah tersebut.
- 3) Dharma Pongrekun dalam berita ini di *frame* sebagai penyebab masalah. Kompas.com tidak terlalu banyak membahas tentang pencantutan yang dilakukan oleh Dharma Pongrekun namun, Kompas.com lebih memfokuskan isi berita terhadap KPU dan Bawaslu.

Framing ini menggambarkan upaya Kompas.com untuk memberikan gambaran objektif tentang proses penanganan pencurian NIK, dengan menyoroti prosedur yang diikuti, peran lembaga, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Kompas.com dalam berita ini lebih condong untuk membahas KPU dan Bawaslu sehingga terdapat pengalihan isu yang dilakukan oleh Kompas.com akan tetapi pemberitaan terkait pencurian juga bermakna negatif untuk seorang calon gubernur independen Jakarta 2024.

3.4.2 Analisis *Framing* Terhadap Berita 2



(Sumber : Kompas.com)

Gambar 3. 2 Screenshot Visual Berita 2

Tabel 3. 3 Analisis Berita 2

Mendefinisikan Masalah.	Masalah yang terdapat pada berita ini yaitu potensi jeratan pidana terhadap Dharma-Kun terkait dugaan pencurian NIK warga.
Mendiagnosis Penyebab.	Penyebab masalah yaitu dugaan pencurian NIK warga tanpa izin oleh Dharma Pongrekun serta ketidaktegasan KPU dan Bawaslu dalam menangani kasus ini. Terdapat beberapa aktor yang terlibat, yaitu Dharma Pongrekun sebagai pihak yang diduga melakukan pelanggaran, Bawaslu sebagai lembaga yang harus mengambil tindakan, warga yang NIK nya dicatut, dan KPU sebagai penyelenggara

	pemilu yang bertanggung jawab atas transparansi proses pemilihan.
Membuat Penilaian Moral.	Berita ini memberikan penilaian moral negatif terhadap Dharma Pongrekun karena dianggap melanggar hukum dan etika pemilu. KPU dan Bawaslu juga dikritik karena dinilai kurang tegas dalam menangani kasus ini. Pakar hukum Finsensius Mendrofa menegaskan bahwa pencurian NIK adalah pelanggaran serius yang harus ditindak tegas.
Rekomendasi Penyelesaian.	Dalam berita tersebut bahwa terdapat beberapa rekomendasi penyelesaian yaitu : (1). Pembatalan pencalonan Dharma-Kun jika terbukti bersalah (2). Penjatuhan sanksi pidana. (3). Bawaslu diminta lebih tegas dalam penegakan hukum

Sumber : (Pamungkas, 2023)

Berdasarkan hasil analisis *framing* diatas terdapat beberapa aspek pembahasan. Dalam hal tersebut Dharma Pongrekun dapat dikenakan sanksi pidana jika terbukti melakukan pencurian NIK, menunjukkan bahwa ini adalah masalah ini *di)frame* sebagai isu hukum yang berat, bukan sekadar

pelanggaran administratif pemilu. Selanjutnya dalam berita tersebut menekankan pentingnya ketegasan Bawaslu dalam menangani kasus ini, Finsensius Mendrofa mengatakan bahwa hal tersebut penting untuk kelangsungan demokrasi. Selain itu, terdapat kritik terhadap KPU dan Bawaslu yang dianggap kurang tegas dalam menangani dugaan kecurangan kasus pencurian NIK. Hal tersebut menggambarkan bahwa integritas dari sebuah lembaga penyelenggara pemilu sedang mengalami tantangan yang serius yang dapat berpengaruh terhadap kredibilitas.

Framing ini menunjukkan upaya Kompas.com untuk memberikan gambaran serius tentang pelanggaran dalam proses pemilu, menekankan konsekuensi hukum dan dampaknya terhadap demokrasi. Secara keseluruhan, kasus pencurian NIK oleh Dharma Pongrekun adalah masalah serius yang memerlukan penanganan tegas dan dapat mempengaruhi kredibilitas dari seorang Dharma Pongrekun.

3.4.3 Analisis *Framing* Terhadap Berita 3



(Sumber (Sumber : Kompas.com))

Gambar 3. 3 Screenshot Visual Berita 3

Tabel 3. 4 Analisis Berita 3

Mendefinisikan Masalah.	Berita ini menyoroti kecurigaan Ahok terhadap proses lolosnya Dharma Pongrekun dalam Pilkada Jakarta 2024. Terdapat kejanggalaan dalam prosedur verifikasi dukungan, khususnya terkait pencurian NIK warga Jakarta.
Mendiagnosis Penyebab.	Kritik Ahok terhadap Dharma Pongrekun mengenai pencurian NIK untuk mendaftar sebagai calon gubernur independen DKI Jakarta 2024.

Membuat Penilaian Moral.	Ahok menilai proses pendaftaran tidak transparan dan mengkritik KPU karena memperlihatkan perlakuan berbeda dibandingkan saat dirinya mencoba maju sebagai calon independen pada Pilkada 2017. Dia mencurigai adanya rekayasa administratif yang memudahkan Dharma Pongrekun untuk lolos Pilkada 2024, termasuk dengan mencatut NIK warga tanpa verifikasi ketat.
Rekomendasi Penyelesaian.	Rekomendasi yang diajukan adalah perlunya investigasi mendalam terkait pencurian NIK dan meminta KPU menjelaskan mekanisme pendaftaran calon. Ahok bahkan menyarankan pemilih untuk mempertimbangkan opsi kotak kosong sebagai bentuk protes terhadap dugaan rekayasa tersebut.

Sumber : (Pamungkas, 2023)

Framing dalam berita yang berjudul “Ahok Curiga "Ada Sesuatu" yang Buat Dharma-Kun Lolos Jadi Paslon Independen Pilkada Jakarta” terdapat beberapa poin terkait dugaan pencurian NIK dalam proses pendaftaran calon independen.

- 1) Berita ini menyoroti keanehan dalam proses administrasi pemilihan calon gubernur independen dengan statement Ahok yang mempertanyakan betapa mudahnya prosedur pendaftaran tersebut.
- 2) Dalam berita ini terdapat kata “calon boneka” yang secara tidak langsung menyinggung Dharma Pongrekun sebagai calon gubernur yang lemah dalam konteks politik di Jakarta dan sebagai pengisi dari kotak kosong saja.
- 3) *Frame* dalam berita ini membandingkan dengan dua situasi yang berbeda yaitu pada tahun 2017 Ahok menyatakan bahwa persyaratan untuk maju sebagai calon independen cukup ketat dibandingkan dengan tahun 2024 ketika Dharma Pongrekun yang maju sebagai calon independen.

Kompas.com berupaya untuk menampilkan persoalan integritas proses demokrasi, dengan menekankan pentingnya transparansi dan kepatuhan pada aturan pemilihan berdasarkan dari sudut pandang Ahok. Kasus pencurian NIK oleh pasangan Dharma Pongrekun tidak sekadar persoalan administratif tetapi dapat merusak nama baik dari Dharma Pongrekun.

3.4.4 Analisis *Framing* Terhadap Berita 4



(Sumber : Kompas.com)

Gambar 3. 4 Screenshot Visual Berita 4

Tabel 3. 5 Analisis Berita 4

Mendefinisikan Masalah.	Berita membingkai kontroversi dugaan "calon boneka" yang merujuk pada Dharma Pongrekun dalam Pilkada Jakarta 2024, dengan fokus pada tanggapan Ridwan Kamil yang membantah Dharma Pongrekun sebagai calon lemah.
Mendiagnosis Penyebab.	Penyebab utama adalah kekhawatiran PDIP yang dikatakan oleh Hasto Kristiyanto tentang penyalahgunaan kekuasaan untuk menciptakan calon boneka, termasuk dugaan pencurian KTP warga tanpa izin.

Membuat Penilaian Moral.	Ridwan Kamil menekankan pentingnya menghormati proses demokrasi dan keputusan KPU, dengan mengakui kredibilitas Dharma Pongrekun sebagai purnawirawan bintang tiga.
Rekomendasi Penyelesaian.	Perlu penyelesaian masalah pencurian KTP oleh KPU dan Bawaslu, serta investigasi oleh aparat penegak hukum untuk menjaga integritas proses pemilihan.

Sumber : (Pamungkas, 2023)

Berdasarkan tabel 3.5, peneliti memaknai berita sebagai *framing* yang terdapat empat poin utama, yaitu:

- 1) Ridwan Kamil menekankan pentingnya menghormati proses demokrasi dengan menerima siapapun yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh KPU.
- 2) Berita ini menunjukkan perbedaan pandangan antara Ridwan Kamil, yang mengapresiasi kredibilitas Dharma Pongrekun sebagai jenderal polisi bintang tiga, dan kekhawatiran PDI-P yang dikatakan oleh Sekretaris Jenderal yaitu Hasto Kristiyanto mengenai adanya "calon boneka".
- 3) Dharma Pongrekun di *frame* sebagai orang yang bakal disebut dengan "calon boneka". Calon boneka dalam hal ini dimaknai

dengan kandidat yang sengaja diloloskan untuk menghindari pasangan calon gubernur melawan kotak kosong.

- 4) Kompas.com dalam berita mencantumkan persoalan mengenai pecantutan NIK sebagai masalah yang serius dan harus diusut oleh aparat hukum.

Framing yang diterapkan oleh Kompas.com dalam pemberitaan tersebut mencerminkan upaya untuk menyajikan dua sudut pandang yang berbeda terkait isu calon boneka dalam Pilkada Jakarta. Namun, pernyataan yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDI-P cenderung lebih banyak memuat informasi atau narasi yang bersifat negatif terhadap Dharma Pongrekun sebagai calon gubernur Jakarta, dibandingkan dengan pernyataan yang diberikan oleh Ridwan Kamil. Kritik yang terdapat dalam berita yang dikatakan oleh tokoh-tokoh politik tersebut akan berdampak signifikan terhadap citra Dharma Pongrekun.

3.4.5 Analisis *Framing* Terhadap Berita 5



(Sumber : Kompas.com)

Gambar 3. 5 Screenshot Visual Berita 5

Tabel 3. 6 Analisis Berita 5

Mendefinisikan Masalah.	Ketidakhadiran Dharma Pongrekun dalam pemeriksaan Bawaslu DKI Jakarta terkait dengan pencurian NIK menjadi inti permasalahan berita ini.
Mendiagnosis Penyebab.	Penyebab masalah adalah pencurian NIK warga Jakarta dalam proses pencalonan Dharma Pongrekun serta KPU Jakarta yang dianggap kontroversi karena meloloskan Dharma meskipun Dharma Pongrekun sedang terdapat masalah pencurian NIK.

Membuat Penilaian Moral.	Terdapat penilaian negatif dalam ini yaitu sikap Dharma Pongrekun yang tidak mau bekerja sama dengan merujuk pada kata “mangkir”. Enny Sabdo mengatakan meski sudah dipanggil dua kali oleh Bawaslu DKI Jakarta, Dharma dan Kun belum juga menghadiri panggilan tersebut. Pada pemanggilan ketiga hari ini, mereka diminta untuk lebih kooperatif.
Rekomendasi Penyelesaian.	Perlu adanya investigasi lebih lanjut oleh Bawaslu untuk mengungkap kebenaran dugaan pencurian NIK. Selain itu, dalam berita ini menyarankan agar Dharma dan KPU DKI Jakarta lebih kooperatif dalam proses investigasi.

Sumber : (Pamungkas, 2023)

Berdasarkan analisis *framing* dari berita tersebut, terdapat tiga pembahasan, yaitu:

- 1) Kompas.com membingkai kasus ini sebagai masalah cukup serius terkait integritas pemilu, di mana dugaan pencurian NIK oleh Dharma Pongrekun dipandang sebagai pelanggaran etika dan hukum yang merugikan warga Jakarta. Terdapat Sejumlah warga menyatakan keberatan karena NIK mereka terdaftar sebagai pemberi dukungan tanpa sepengetahuan mereka.
- 2) Kompas.com membingkai sikap tidak kooperatif dari pasangan calon ini tunjukan melalui penggunaan kata "mangkir" yang terdapat pada judul berita dan dalam berita dijelaskan bahwa mereka telah dua kali tidak menghadiri panggilan. Kata mangkir tentunya akan berdampak negatif kepada Dharma Pongrekun sebagai calon gubernur independen.
- 3) Kompas.com dalam berita ini membingkai pentingnya proses investigasi Bawaslu sebagai upaya penegakan hukum dan transparansi dalam Pilkada Jakarta 2024

Berdasarkan pembahasan poin-poin diatas, Kompas.com menyajikan berita ini dengan pembingkaian yang menekankan pada aspek pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap proses hukum yang dibuktikan dengan Dharma Pongrekun yang bersikap tidak kooperatif atau tidak bisa diajak kerjasama. Cara Kompas.com membingkai isi dalam pemberitaan ini menunjukkan citra yang negatif mengenai Dharma Pongrekun sebagai calon gubernur independen. Penulisan kata-kata dalam berita ini banyak merujuk kepada sesuatu hal yang negatif sehingga berpotensi merusak kepercayaan

publik terhadap Dharma Pongrekun namun, Kompas.com berusaha untuk menyampaikan informasi tersebut sesuai dengan fakta.

3.4.6 Analisis *Framing* Terhadap Berita 6



(Sumber : Kompas.com)

Gambar 3. 6 Screenshot Visual Berita 6

Tabel 3. 7 Analisis Berita 6

Mendefinisikan Masalah.	Penghentian penyelidikan oleh polisi terkait laporan pencurian NIK yang diajukan oleh seorang warga yang bernama Samson untuk mendukung pasangan calon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Masalah utama dalam berita ini adalah kesalahan prosedur, di mana Samson
-------------------------	--

	melaporkan kasusnya ke polisi, bukan ke Bawaslu, yang seharusnya menjadi institusi yang tepat untuk menangani masalah ini.
Mendiagnosis Penyebab.	Samson, sebagai warga yang melaporkan kasus ini ke polisi, menjadi pelaku langsung dalam masalah ini. Polda Metro Jaya yang menghentikan penyelidikan, dan Bawaslu, yang seharusnya menangani kasus semacam ini, berperan sebagai lembaga terkait.
Membuat Penilaian Moral.	Dari sudut pandang moral, penghentian penyelidikan ini dapat dilihat sebagai langkah yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang untuk menangani pelanggaran pemilihan. Namun, terdapat rasa kekecewaan dari masyarakat, terutama bagi Samson dan warga lainnya yang merasa NIK mereka dicatut.
Rekomendasi Penyelesaian.	Berita ini merekomendasikan agar masyarakat yang merasa dirugikan oleh pencurian NIK untuk melaporkan masalah tersebut langsung kepada Bawaslu, sesuai dengan penjelasan

	yang diberikan oleh polisi dalam berita tersebut. Selain itu, Bawaslu harus merespons laporan-laporan tersebut dengan cepat dan transparan, agar masyarakat merasa didengar dan masalah ini dapat ditangani dengan baik.
--	--

Sumber : (Pamungkas, 2023)

Peneliti memaknai keseluruhan isi berita sebagai sebuah *framing* yang membahas beberapa poin pembahasan.

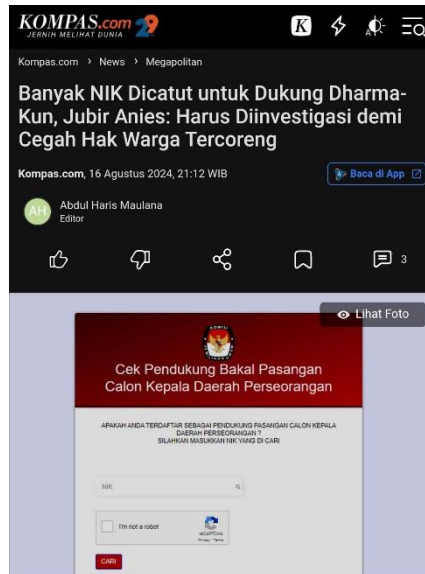
- 1) *Framing* dalam berita ini membahas keputusan polisi untuk menghentikan penyelidikan terkait laporan yang dilaporkan oleh Samson terkait dengan pencurian NIK. Kompas.com membingkai penghentian penyelidikan kasus pencurian NIK sebagai masalah prosedural hukum, bukan sebagai pembatalan atau pengabaian kasus. Penghentian terjadi dikarenakan adanya prosedur yang berbeda untuk menangani kasus pelanggaran tersebut. Polda Metro Jaya mengatakan bahwa laporan seharusnya dimulai dari Bawaslu terlebih dahulu kemudian diteruskan kepada pihak polisi.
- 2) Dalam berita ini, Kompas.com mengutip berbagai dasar hukum yang menjadi landasan keputusan polisi. Pembingkai ini diperkuat dengan penjelasan detail tentang UU yang mengatur mekanisme pelaporan pelanggaran pemilu, menunjukkan bahwa kasus ini memerlukan jalur penanganan khusus.

3) Kompas.com dalam membingkai berita ini tidak menggunakan kata-kata yang bersifat negatif secara berlebihan untuk menggambarkan Dharma Pongrekun yang terlibat dalam pencurian NIK.

Namun, berita ini juga berpotensi mendapatkan kekecewaan dari masyarakat, terutama bagi Samson dan warga lainnya yang merasa NIK mereka dicatut. Penghentian penyelidikan dapat menimbulkan persepsi bahwa laporan mereka tidak ditanggapi dengan serius. *Framing* dalam berita ini secara negatif mengkonstruksikan citra Dharma sebagai calon gubernur independen Jakarta 2024. Kompas.com memilih fakta-fakta yang dapat merugikan Dharma dan menonjolkan aspek yang membahas mengenai hukum yang dimaknai dengan sesuatu masalah yang cukup serius.

Framing yang dilakukan oleh Kompas.com dalam berita ini berusaha menampilkan berita dengan fokus pada aspek prosedural dan hukum. Pemberitaan ini menunjukkan bahwa meskipun penyelidikan dihentikan, masih ada jalur hukum yang bisa ditempuh melalui Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang menangani pelanggaran pemilu.

3.4.7 Analisis *Framing* Terhadap Berita 7



(Sumber : Kompas.com)

Gambar 3. 7 Screenshot Visual Berita 7

Tabel 3. 8 Analisis Berita 7

Mendefinisikan Masalah.	Berita ini membingkai masalah sebagai kasus pencurian NIK warga Jakarta untuk mendukung Dharma Pongrekun, bahkan melibatkan keluarga tokoh politik seperti anak dan adik Anies Baswedan.
Mendiagnosis Penyebab.	Penyebab masalah pada proses pengumpulan dukungan untuk Dharma Pongrekun yang tidak transparan. Kompas.com menyoroti bahwa banyak warga, termasuk tim dan keluarga Anies, mengaku tidak pernah dimintai data atau mendapat verifikasi faktual,

	namun NIK mereka tercatat sebagai pendukung.
Membuat Penilaian Moral.	Berita membingkai masalah ini sebagai pelanggaran etika dan hak warga dalam proses demokrasi. Pernyataan dari jubir Anies yang menyebut "hak warga tercoreng" menunjukkan bahwa tindakan pencurian NIK merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan berpotensi merusak integritas proses pemilihan calon gubernur.
Rekomendasi Penyelesaian.	Terdapat solusi yang ditawarkan dalam berita ini yaitu investigasi yang serius terhadap kasus pencurian NIK. Untuk melindungi hak warga Jakarta dalam Pilgub DKI 2024, juru bicara Anies memberikan pernyataan yang menguatkan rekomendasi tersebut dengan menekankan pentingnya tindakan pencegahan.

Sumber : (Pamungkas, 2023)

Berdasarkan analisis *framing* dari berita diatas, terdapat beberapa poin utama dalam pembingkaiian berita ini yaitu:

- 1) Kompas.com membingkai kasus pencurian NIK sebagai masalah serius yang tidak hanya terjadi pada warga, tetapi juga terjadi kepada tokoh politik seperti keluarga Anies Baswedan. Berita ini menekankan bahwa pencurian NIK merupakan pelanggaran hak warga yang memerlukan penanganan serius, terlebih dengan adanya laporan dari banyak warga yang mengklaim tidak pernah memberikan persetujuan untuk mendukung
- 2) Pemberitaan ini membingkai kontroversi pencurian NIK dengan membantah dua fakta yaitu pengakuan banyak warga yang NIK nya dicatut dan kelolosan Dharma-Kun dalam memenuhi syarat dukungan minimal verifikasi faktual. Kompas.com memperkuat *framing* ini dengan menyajikan data detail dari KPU tentang jumlah dukungan yang memenuhi syarat namun, dibalik lolosnya Dharma terdapat banyak warga yang NIK nya telah dicatut.
- 3) Kompas.com membingkai pernyataan jubir Anies yang menekankan pentingnya investigasi. Tindakan tersebut sebagai pencegahan untuk melindungi hak-hak warga Jakarta dalam Pilgub 2024.

Dalam berita ini Kompas.com menggunakan “Anies Baswedan” sebagai penonjolan utama untuk masalah dari Dharma Pongrekun. *Framing* yang diterapkan oleh Kompas.com dalam berita ini bertujuan untuk menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengumpulan dukungan untuk calon independen. Kompas.com

menampilkan reaksi negatif dari tokoh politik yaitu Anies Baswedan melalui juru bicara nya. Dengan menampilkan masalah pencurian NIK yang terjadi pada Anies secara tidak langsung Kompas.com berpotensi merusak citra Dharma Pongrekun sebagai calon gubernur independen. Namun, Kompas.com menampilkan informasi secara merata seimbang dengan memuat pandangan dari berbagai pihak, seperti pernyataan juru bicara Anies, kesaksian warga, dan data resmi dari KPU terkecuali dari pihak Dharma Pongrekun. Berita ini juga menggarisbawahi pentingnya investigasi sebagai langkah untuk menjaga kejujuran dan keadilan dalam proses demokrasi.

3.4.8 Analisis *Framing* Terhadap Berita 8



(Sumber : Kompas.com)

Gambar 3. 8 Screenshot Visual Berita 8

Tabel 3. 9 Analisis Berita 8

Mendefinisikan Masalah.	Permasalahannya sebagai upaya Dharma Pongrekun untuk menjelaskan posisi mereka terkait dugaan pencurian NIK warga Jakarta
Mendiagnosis Penyebab.	Penyebab utama permasalahan ini terletak pada proses pengumpulan data dukungan yang dilakukan oleh relawan, bukan secara langsung oleh Dharma Pongrekun. Dalam pernyataannya, Dharma menegaskan bahwa para relawan tersebut merupakan individu yang memiliki motivasi untuk "menyelamatkan jiwa keluarga mereka, sebuah narasi yang dikaitkan dengan visi kampanye Dharma.
Membuat Penilaian Moral.	Dalam pemberitaan ini, Dharma digambarkan sebagai sosok yang menghindar dari tanggung jawab terhadap masalah yang sedang berlangsung. Media membingkai sikap Dharma-Kun yang melepaskan tanggung jawab atas pengumpulan data dengan mengarahkannya kepada relawan. Dalam berita tersebut Dharma Pongrekun juga tidak mengucapkan permintaan maaf sehingga hal

	tersebut menimbulkan kesan bahwa Dharma tidak sepenuhnya bersalah.
Rekomendasi Penyelesaian.	Berita menampilkan perspektif Dharma yang menyerahkan proses verifikasi KPU sebagai filter untuk menyaring data pendukung yang tidak valid.

Sumber : (Pamungkas, 2023)

Berdasarkan analisis *framing* dari berita diatas terdapat beberapa poin pembahasan dalam pembingkai berita ini yaitu:

- 1) Kompas.com membingkai respon Dharma terhadap dugaan pencurian NIK sebagai bentuk pengalihan tanggung jawab, dimana pasangan calon tersebut menyatakan tidak terlibat langsung dalam pengumpulan data dan menyerahkan sepenuhnya kepada relawan.
- 2) Kompas.com juga membingkai motivasi relawan yang digambarkan Dharma dengan narasi "menyelamatkan jiwa keluarga" sebagai bentuk pengalihan dari isu utama pencurian NIK. Pembingkai ini menunjukkan bagaimana Dharma Pongrekun mencoba mengalihkan fokus dari masalah pencurian ke narasi kampanye mereka.

Framing yang dilakukan oleh Kompas.com cenderung memberikan penilaian negatif dengan menggambarkan Dharma sebagai individu yang enggan menerima kesalahan dan cenderung menyalahkan pihak relawan. *Framing* yang dilakukan oleh Kompas.com dalam berita ini berusaha untuk menonjolkan berita yang serius yaitu dugaan pencurian NIK dengan respon pasangan calon yang terkesan menghindar dari tanggung jawab langsung. Berita ini menyajikan informasi yang memperlihatkan pengalihan tanggung jawab dalam penanganan isu pencurian NIK yang dilakukan oleh Dharma.

3.4.9 Analisis *Framing* Terhadap Berita 9



(Sumber : Kompas.com)

Gambar 3. 9 Screenshot Visual Berita 9

Tabel 3. 10 Analisis Berita 9

Mendefinisikan Masalah.	Masalah utama yang dibingkai dalam berita ini adalah dugaan pencurian KTP warga untuk mendukung calon gubernur jalur independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana
Mendiagnosis Penyebab.	Penyebab masalah yaitu tidak ada konfirmasi dari pihak KPU maupun Dharma kepada warga terkait dengan pencurian NIK. Warga seperti Faiz dan Felicia mengaku tidak pernah didatangi oleh tim KPU atau tim Dharma Pongrekun untuk meminta persetujuan dukungan.
Membuat Penilaian Moral.	Terdapat penilaian moral negatif terhadap pasangan calon Dharma Pongrekun dan proses verifikasi yang dilakukan KPU. Berita ini memberikan penilaian moral negatif terhadap pasangan calon Dharma-Kun dan proses verifikasi yang dilakukan KPU. Penggunaan kata "dicatut" bermakna bahwa tindakan ini dinilai tidak etis dan melanggar hak pribadi warga.

Rekomendasi Penyelesaian.	Kompas.com secara langsung dalam berita menyebutkan bahwa sedang menghubungi pihak dari Dharma Pongrekun untuk mengkonfirmasi terkait pencurian NIK.
------------------------------	--

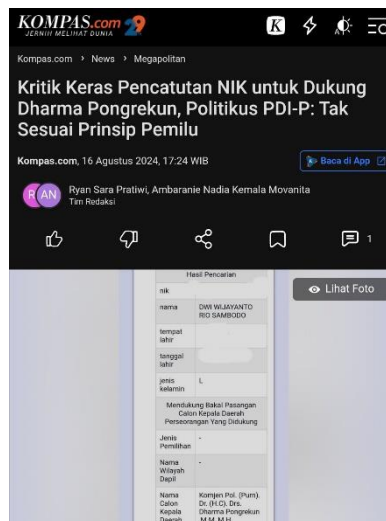
Sumber : (Pamungkas, 2023)

Berdasarkan analisis *framing* dari berita tersebut, Kompas. Com membingkai dugaan pencurian KTP sebagai masalah yang cukup berat dalam proses pencalonan Dharma Pongrekun. Pembingkai ini menekankan bahwa telah terjadi penyalahgunaan data pribadi warga yang berpotensi merusak integritas proses pemilihan. Kompas.com menyoroti fakta dengan menulis dalam berita bahwa petugas KPU melakukan kunjungan kepada masyarakat sebatas untuk pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih, tidak untuk memverifikasi dukungan. Berita ini juga membingkai adanya ketidakjelasan dari pihak Dharma Pongrekun dengan menyebutkan bahwa upaya konfirmasi belum mendapat jawaban. Dalam penilaian aspek moral, berita ini secara tidak langsung memberikan penilaian bahwa tindakan pencurian KTP merupakan tindakan yang tidak etis dan melanggar hak pribadi warga.

Framing yang diterapkan Kompas.com dalam beita ini tentunya akan berdampak negatif kepada Dharma Pongrekun. Kompas.com secara negatif mengkonstruksikan citra Dharma Pongrekun dengan menyoroti korban-korban dari pencurian NIK yang dilakukan oleh Dharma dalam

berita ini dapat menciptakan persepsi yang buruk bagi seorang calon gubernur independen. Kompas.com dalam berita ini berusaha untuk menekankan pelanggaran etika dan hukum yang terjadi dalam proses pengumpulan dukungan Dharma Pongrekun. Berita ini menampilkan informasi dengan menampilkan fakta fakta terkait dugaan pelanggaran serta perspektif dari warga yang dirugikan.

3.4.10 Analisis *Framing* Terhadap Berita 10



(Sumber : Kompas.com)

Gambar 3. 10 Screenshot Visual Berita 10

Tabel 3. 11 Analisis Berita 10

Mendefinisikan Masalah.	Masalah yang dibingkai dalam berita ini adalah pencurian NIK tanpa izin untuk mendukung Dharma Pongrekun. <i>Framing</i> masalah diperkuat dengan menampilkan kasus spesifik seorang anggota DPRD DKI Jakarta
-------------------------	---

	dari PDI-P, Dwi Rio Sambodo, yang NIK nya juga dicatut.
Mendiagnosis Penyebab.	Penyebab masalah yaitu pencurian yang dilakukan oleh Dharma Pongrekun terhadap masyarakat Jakarta salah satunya yaitu Rio Sambodo selaku anggota DPRD DKI Jakarta yang berasal dari Fraksi PDI-P memberikan kritik terhadap permasalahan tersebut
Membuat Penilaian Moral.	Penilaian moral dalam berita ini disampaikan melalui pernyataan Rio yang dikutip langsung, bahwa tindakan pencurian " bertentangan dengan prinsip dasar penyelenggaraan pemilu yang mengutamakan aspek langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil" Berita ini juga membingkai pencurian NIK sebagai pelanggaran konstitusional dan legal dengan merujuk pada Pasal 28G Ayat 1 UUD 1945, UU Perlindungan Data Pribadi, dan Pasal 185A Ayat 1 UU Pilkada.
Rekomendasi Penyelesaian.	Solusi yang diusulkan dalam berita ini mencakup beberapa langkah untuk menangani masalah pencurian NIK. (1). Dilakukan

	pengecekan di lapangan untuk memastikan kebenaran kasus pencurian yang dilaporkan. (2). Masyarakat diimbau untuk secara aktif memeriksa data pribadi mereka guna mengidentifikasi kemungkinan pencurian. (3). Penyediaan kanal pengaduan bagi korban pencurian, sehingga mereka dapat melaporkan kejadian tersebut dengan mudah. Laporan-laporan yang diterima akan dikumpulkan dan diajukan kepada Penjabat Gubernur dan Dukcapil DKI Jakarta untuk ditindaklanjuti.
--	---

Sumber : (Pamungkas, 2023)

Berdasarkan analisis *framing* dari berita tersebut, Kompas.com membingkai isu pencurian NIK sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip pemilu dan hukum perlindungan data pribadi. Pembingkaiannya ini diperkuat dengan menampilkan kasus seorang politikus, Dwi Rio Sambodo yang data NIK-nya juga menjadi korban pencurian untuk mendukung pasangan Dharma-Kun. Penggunaan kata "kritik keras" pada judul dan kutipan langsung dari Rio dimaknai dengan keseriusan pelanggaran ini sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Kompas.com juga membingkai masalah ini sebagai pelanggaran hukum dengan merujuk pada undang-undang yang spesifik. Penyebutan Pasal 28G Ayat 1 UUD 1945, UU Perlindungan Data Pribadi, dan kutipan lengkap dari Pasal 185A Ayat 1 UU Pilkada tentang ancaman pidana dan denda memperkuat *framing* bahwa tindakan ini memiliki konsekuensi hukum yang berat.

Berita ini membingkai solusi melalui tindakan konkret yang diambil oleh Rio dan partainya, seperti melakukan pengecekan di lapangan, menyediakan kanal pengaduan, dan mengumpulkan laporan untuk diajukan kepada pihak berwenang. *Framing* ini menekankan pentingnya partisipasi aktif berbagai pihak dalam mengatasi masalah, dari tingkat individu hingga institusi pemerintah.

Dalam berita ini Kompas.com menonjolkan reaksi negatif dari tokoh politik terhadap pencalonan Dharma Pongrekun. Kritikan yang cenderung negatif akan berpengaruh terhadap citra seorang calon gubernur. Kompas.com menyajikan informasi dengan menyoroti dampak negatif dari pencurian NIK terhadap integritas proses pemilu, sekaligus membangun narasi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pencalonan jalur perseorangan. Pembingkai ini menekankan bahwa masalah pencurian NIK bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi merupakan ancaman terhadap prinsip dasar demokrasi dan hak pribadi warga.